

# DARI LAYANAN KONSULTASI KE LAYANAN KOLABORASI: SEBUAH MODEL LAYANAN TIDAK LANGSUNG BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

**Juster Donal Sinaga**

Program Studi Bimbingan dan Konseling  
Universitas Sanata Dharma  
Email: [donalsinaga@usd.ac.id](mailto:donalsinaga@usd.ac.id)

## Abstrak

Layanan Bimbingan dan Konseling adalah salah satu komponen pendidikan. Kesuksesan pribadi, sosial, belajar, dan karier siswa salah satunya ditentukan oleh efektivitas dan produktivitas layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Pada kenyataannya, peran layanan Bimbingan dan konseling di sekolah belum cukup optimal. Kehadiran Layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah masih menyisakan “pekerjaan rumah”. Siswa belum mendapatkan manfaat yang maksimal dari layanan Bimbingan dan Konseling. Disinyalir beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu: (1) Guru Bimbingan dan Konseling yang tidak berlatar belakang sarjana pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling; (2) rasio Guru Bimbingan dan Konseling dan siswa lebih besar dari 1:150; (3) kompetensi guru Bimbingan dan Konseling yang rendah sehingga kurang mampu menghantarkan layanan Bimbingan dan Konseling dengan baik; (4) regulasi sekolah yang kurang memfasilitasi terselenggaranya layanan Bimbingan dan Konseling; (5) tugas dan tanggungjawab Guru Bimbingan dan Konseling melebihi yang seharusnya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memaksimalkan layanan Bimbingan dan Konseling. Salah satu alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk memaksimalkan layanan Bimbingan dan Konseling adalah optimalisasi layanan tidak langsung Bimbingan dan Konseling. Tulisan ini menawarkan satu model layanan tidak langsung Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu pendukung keberhasilan layanan langsung Bimbingan dan Konseling di sekolah. Model layanan tidak langsung Bimbingan dan Konseling yang ditawarkan adalah layanan konsultasi yang berlanjut kepada layanan kolaborasi. Model ini dipandang efektif. Paling tidak model layanan tidak langsung Bimbingan dan Konseling ini akan menyelesaikan permasalahan rasio Guru Bimbingan dan Konseling dengan siswa, regulasi sekolah yang kurang mendukung, khususnya terkait dengan jam Guru Bimbingan dan Konseling masuk kelas. Selain itu, model ini akan mengimplementasikan pendidikan kolaboratif partisipatif dalam bingkai Program Bimbingan dan Konseling Komprehensif.

**Kata Kunci:** *Layanan tidak langsung, bimbingan, konseling, konsultasi, kolaborasi,*

## LATAR BELAKANG

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Dalam konteks pendidikan Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu komponen pendidikan yang integral untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan dikatakan bahwa konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Dalam Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor diuraikan secara rinci penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Regulasi-regulasi tersebut selama ini telah digunakan dan membantu para guru BK mengimplementasikan program-program bimbingan dan konseling di sekolah. Sangat disayangkan, selama ini program bimbingan dan konseling di sekolah yang disampaikan kepada siswa fokus kepada layanan langsung kepada siswa (*indirect student service*), sedangkan layanan tidak langsung kepada siswa (*indirect student service*) kurang mendapat perhatian. Menurut penelitian Maryati (2010) guru BK di SMAN 1 Kampar belum sepenuhnya mempunyai pemahaman tentang layanan konsultasi yang ada di sekolah. Guru BK tidak bisa membedakan antara layanan konsultasi dengan layanan konseling individual. Widodo (2009) mengatakan bahwa layanan Konsultasi belum lazim dicantumkan secara eksplisit sebagai salah satu komponen program bimbingan yang penting untuk diimplementasikan.

Salah dua layanan tidak langsung kepada siswa dalam bimbingan dan konseling di sekolah adalah layanan konsultasi dan layanan kolaborasi. Dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan (POP) Bimbingan dan Konseling di sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2016 layanan konsultasi dan kolaborasi dicantumkan secara eksplisit sebagai salah satu layanan langsung dalam komponen layanan responsif. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA didasarkan kepada tujuan, prinsip, fungsi dan azas bimbingan dan konseling. Kegiatannya mencakup semua komponen dan bidang layanan melalui layanan langsung, media, kegiatan administrasi, serta kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian guru bimbingan dan konseling. Layanan langsung meliputi (1) konseling individual, (2) konseling kelompok, (2) bimbingan kelompok, (4) bimbingan klasikal, (5) bimbingan kelas besar atau lintas kelas, (6) konsultasi, (7) kolaborasi, (8) alih tangan kasus, (9) konferensi kasus, (10) layanan advokasi, dan (11) layanan peminatan

Penulis berpendapat bahwa pencantuman layanan konsultasi dan kolaborasi secara eksplisit dalam pedoman tersebut, sebagai refleksi para pakar bimbingan dan konseling yang menyusun pedoman tersebut sekaligus penegasan teori bahwa layanan konsultasi dan kolaborasi merupakan salah satu komponen dalam layanan bimbingan dan konseling yang perlu mendapat perhatian konselor, walaupun ditempatkan sebagai layanan langsung kepada siswa.

Penempatan layanan konsultasi dan kolaborasi sebagai layanan langsung kiranya perlu dikritisi. Ada perbedaan konsep tentang layanan konsultasi dan layanan kolaborasi di dalam POP (2016) dengan penjelasan yang ada dalam dokumen *ASCA National Model* (2012) sebagai pelopor Bimbingan dan Konseling Komprehensif. Dalam *ASCA National Model* dijelaskan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai layanan tidak langsung sebagai berikut:

*Indirect services are provided on behalf of students as a result of the school counselors' interactions with others including referrals for additional assistance, consultation and collaboration with parents, teachers, other educators and community organizations.*

*ASCA National Model* menempatkan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai layanan yang tidak langsung berhadapan dengan siswa tetapi manfaatnya dirasakan oleh siswa. Perbedaan konsep ini patut dikritisi untuk menempatkan layanan konsultasi dan kolaborasi pada tempatnya sesuai dengan konsep dan teori.

Penulis memiliki hipotesis terkait dengan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi. Layanan tidak langsung merupakan sarana untuk mendukung semua siswa untuk mencapai sukses akademik melalui interaksi tidak langsung dengan siswa sebagai penerima manfaat layanan Bimbingan dan Konseling, tetapi melalui kerjasama guru BK/konselor dengan berbagai pihak: orang tua, guru, administrator, staf sekolah dan tenaga ahli, serta pejabat pemerintah. Layanan tidak langsung bertujuan : (1) membantu memperlancar layanan langsung BK; (2) membantu mengungkap masalah siswa yang tidak terjangkau oleh layanan langsung; (3) membantu memenuhi kebutuhan siswa yang tidak

terjangkau layanan langsung (*ASCA National Model*, 2012). Jika layanan tidak langsung berjalan efektif maka persoalan-persoalan layanan langsung tidak berjalan efektif akan terbantu.

Dapat disebutkan beberapa penyebab layanan langsung tidak berjalan efektif, yaitu: (1) kurangnya kompetensi profesional guru BK, khususnya dalam merancang program BK (Nurahmi, 2010). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jumail (2013) yang menunjukkan bahwa kompetensi konselor sekolah dalam menguasai kerangka teoritik dan praksis Bimbingan dan Konseling, merancang program Bimbingan dan Konseling, menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, menguasai konsep dan praksis penelitian Bimbingan dan Konseling berada dalam katagori sedang; (2) tingginya ratio guru BK/konselor dengan siswa sebagai akibat dari terbatasnya konselor. Keterbatasan guru BK/konselor menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan guru BK/konselor di sekolah. Kenyataan di lapangan, seringkali seorang guru BK/konselor bahkan harus menangani sampai 200 siswa. Bahkan, terdapat beberapa sekolah dengan jumlah siswa mencapai 300-400 orang (Falah, 2016); (3) terbatasnya jam guru BK/konselor masuk kelas (Tulus, 2012). Hal ini mengakibatkan guru BK/konselor terbatas dalam memberikan layanan langsung kepada siswa. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dialokasikan jam masuk kelas selama 2 (dua) jam pembelajaran per minggu setiap kelas secara rutin terjadwal.

Untuk mengoptimalkan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai salah dua bentuk layanan tidak langsung Bimbingan dan Konseling maka penulis merekomendasi model layanan konsultasi dan layanan kolaborasi yang ramah dengan sistem pendidikan Indonesia. Makalah ini memiliki tujuan (1) mengkritisi konsep layanan konsultasi dan kolaborasi dalam POP; (2) menrekomendasi model layanan konsultasi dan kolaborasi sebagai salah dua layanan tidak langsung Bimbingan dan Konseling yang ramah dengan sistem pendidikan Indonesia.

### **Layanan Konsultasi**

Konsultasi merupakan salah satu layanan penting yang disediakan oleh guru BK/konselor, yang membutuhkan kolaborasi yang kompeten dan efektif. Konsultasi adalah kemitraan kolaboratif di mana guru BK/konselor bekerja dengan orang tua, guru, karyawan, psikolog sekolah, pekerja sosial, guru kunjung, tenaga medis profesional, dan tenaga kesehatan profesional lainnya yang dalam merencanakan dan mengimplementasikan berbagai strategi untuk membantu para siswa mendapatkan kesuksesan dalam pendidikan (ASCA, 2005). Dalam perkembangan berikutnya ASCA (2005) mendefinisikan layanan konsultasi sebagai layanan responsif dalam kerangka kerja sistem penyampaian layanan. Dalam *ASCA National Model* (2005) dikatakan: “*counselors consult with parents or guardians, teachers, other educators, and community agencies regarding strategies to help student and families*”. Artinya, layanan konsultasi melibatkan berbagai pihak untuk membantu siswa dan keluarga siswa. Bahkan dalam *ASCA National Model* layanan konsultasi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas utama (*primary activity*) guru BK/konselor dengan melibatkan staf pendidik, orang tua, kolega kerja.

Untuk memahami arti konsultasi sendiri tidak mudah karena banyak definisi konsultasi. Tetapi dalam definisi-definisi konsultasi tersebut mengacu pada adanya interaksi antara guru konselor dengan pihak-pihak lain (Dollarhide dan Saginak, 2012). Dougherty (1990) mendefinisikan konsultasi sebagai berikut:

*“a process in which a human service professional assists a consultee with a work-related (or caretaking-related) problem with a client system, with the goal of helping both the consultee and the client system in some specified way”*

Relasi dalam konsultasi merupakan konfidensial, kolaboratif dan kolegial tanpa adanya perbedaan kekuasaan dan berimplikasi pada supervisi, di mana konsulti mengambil tanggungjawab untuk mengimplementasikan pencerahan dan *outcome* dari hubungan konsultasi tersebut (Dougherty, 1990; Person & Kahn, 2005). Dari definisi-definisi tersebut terdapat beberapa konsep dalam konsultasi, yaitu (1) konsultasi sebagai proses; (2) suasana kerja sama; (3) hubungan antar pribadi; (4) memecahkan suatu masalah (Winkel dan Hastuti, 2013).

Dalam pemahaman tentang konsultasi telah terjadi pergeseran dari pelayanan kepada konseli secara langsung ke pelayanan konseli secara tidak langsung, karena orang meminta bantuan dari konsultan dan konsulti dilibatkan dalam proses mencari pemecahan masalah (Winkel dan Hastuti, 2013). Menurut Kurpius dan Robinson yang dikutip oleh Shertzer dan Stone (Winkel dan Hastuti, 2013) orang yang meminta bantuan dilibatkan secara aktif dalam proses pemecahan masalah melalui usaha kooperatif dalam suasana interaksi pribadi antara konsultan dan meminta bantuan (konsulti). Sebagai layanan tidak langsung, konsultan berusaha membekali pihak yang menghubunginya dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi sendiri masalah yang dihadapi.

Konsultasi sebagai layanan tidak langsung dianggap mempunyai efek yang lebih efektif karena pihak yang meminta bantuan dapat mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi suatu masalah yang mirip di masa yang akan datang, sehingga tidak perlu lagi mendatangi seorang konsultan. Sasaran utamanya bukanlah perubahan pada konseli secara langsung melainkan perubahan pada pihak yang meminta bantuan (konsulti), yang pada gilirannya mengusahakan perubahan pada konseli (Winkel dan Hastuti, 2013).

Menurut Gerald A. Caplan (Winkel dan Hastuti, 2013) ada 2 jenis pendekatan konsultasi, yaitu (1) *client centered approach*, yaitu konsultan bertemu sendiri dengan konseli dan kemudian menyampaikan pandangannya, saran serta anjuran kepada pihak yang meminta bantuan (konsulti). Dalam pendekatan ini, konsultan bertemu langsung dengan konseli, mengidentifikasi masalah konseli, mendiagnosa, kemudian memberikan saran kepada konsulti; (2) *consultee-centered approach*, yaitu konsultan memperoleh informasi tentang konseli dari konsulti. Setelah diperoleh informasi, konsultan bersama konsulti merencanakan sejumlah tindakan yang sebaiknya diambil.

Menurut Erford (2011), terdapat tiga model layanan konsultasi, yaitu (1) Model Triadik Dependen (*Triadic-Dependent Model*). Pada model ini konsultan dipandang sebagai ahli atas permasalahan konsulti yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi permasalahan konseli. Konsultan bekerja bersama konsulti untuk membawa perubahan pada konseli. Walaupun demikian konsultasi pada akhirnya membantu konseli mengalami perubahan melalui bantuan konsulti yang telah berkonsultasi kepada konsultan. Tujuan yang segera diperoleh dari konsultasi model ini adalah meningkatnya keterampilan, pengetahuan, dan objektivitas konsulti sehingga konsulti dapat lebih baik mengimplementasikan rencana intervensi bantuan sehingga perubahan terjadi pada konseli atau siswa; (2) Model Kolaboratif Dependen (*Collaborative-Dependent Model*). Pada model ini proses membantu berangkat dari sudut pandang konsultan sebagai ahli yang terpisah. Kemudian, konsulti melanjutkan pekerjaan dengan bergantung pada: (a) keahlian pemecahan masalah konsultan; (b) pengetahuan konsultan akan perkembangan normal dan abnormal; (c) keterampilan konsultan akan perubahan sistemik dan konseli secara efektif. Dalam hubungan model kolaborasi dependen ini, konsultan juga meningkatkan keahlian konsulti baik dalam mengubah konseli maupun mengubah sistem. Hubungan kerja dalam model ini menjadi sangat penting. Konsultan yang bekerja dengan model ini mungkin akan mengedukasi konsulti tentang proses pemecahan masalah. Dengan demikian, model konsultasi ini konsultan tidak hanya berperan sebagai ahli tetapi juga menjadi mitra kerja untuk mendefinisikan permasalahan, mengimplementasikan intervensi, dan mengevaluasi serta tindak lanjut. Bersama-sama

konsultasi dan konsultasi menetapkan tujuan perubahan pada konseli (siswa). Dengan keahlian masing-masing, konsultasi dan konsultasi membawa proses pemecahan masalah; (3) Model Kolaboratif Interdependen (*collaborative-interdependent model*). Model ini sangat efektif digunakan untuk membantu permasalahan konseli yang sangat kompleks, yaitu masalah multi kasus, multi konteks. Dalam model ini layanan konsultasi dipahami sebagai proses interaksi yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai keahlian bersama-sama menciptakan solusi atas masalah. Model ini menekankan proses pemecahan masalah interdependen antara anggota keluarga, pendidik, konselor, remaja, anggota komunitas. Dalam model ini posisi ahli tidak hanya ada pada satu pihak tetapi pada semua pihak sehingga dengan demikian sharing dan transfer informasi tentang pemecahan masalah menjadi sangat dimungkinkan. Pertukaran informasi kemudian akan menghasilkan rencana tindakan yang komprehensif.

### Layanan Kolaborasi

Drew (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai bangunan sistem interdependen untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai jika dikerjakan sendiri. Sementara ASCA (2005) menggarisbawahi peran kolaborasi dalam Model Nasional, yang mengatakan bahwa “*school counsellor build effective team by encouraging genuine collaboration among all schools staff to work toward the common goal of equity, access, and academic success of every student*”. Artinya, konselor sekolah membangun tim yang efektif dengan mendorong kolaborasi yang asli antara semua staf sekolah untuk bekerja meraih tujuan bersama dari ekuaitas, akses, dan keberhasilan akademik setiap siswa”. Sementara Lawson (2003) mengidentifikasi bahwa hubungan dan komunikasi antara pihak, kerjasama, koordinasi, community building dan kontrak sebagai bagian penting untuk mencapai keberhasilan dalam kolaborasi. Sementara itu C.B. Stone dan Dahir (2004) menekankan bahwa kolaborasi efektif dimulai dari keinginan yang tulus untuk melakukan kolaborasi. Konselor sekolah adalah pihak yang tepat dalam kolaborasi karena kualitas dan keterampilan mereka dalam bekerja. Pekerjaan mereka membutuhkan situasi kolaborasi. Pekerjaan mereka membantu siswa juga mempersyaratkan mereka memiliki keterampilan-keterampilan komunikasi yang juga digunakan dalam kolaborasi.

Sebagaimana dikutip Abdulsyani (1994) menurut Cooley, kolaborasi timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna. Pada dasarnya kolaborasi dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya: demikian pula sebaliknya.

Secara umum layanan kolaborasi melibatkan tiga domain, yaitu (1) sekolah; (2) lembaga masyarakat; dan (3) keluarga (Bemak, 2000). Layanan kolaborasi menurut Dollarhide dan Saginak (2012) terdapat tiga model kolaborasi bimbingan dan konseling. *Pertama*, Model kolaborasi Adelman dan Taylor. Model layanan kolaborasi ini berangkat dari temuan lapangan: (1) yaitu tidak terjadinya dengan baik fungsi integratif para profesional di sekolah: psikolog sekolah, tenaga sosial, perawat, dan konselor sekolah. Peran dan pekerjaan para tenaga profesional ini tumpang tindih dalam membantu siswa. Mereka jarang sekali melakukan koordinasi. Masing-masing tenaga profesional tersebut merasa memiliki wilayah kerja masing-masing (Taylor dan Adelman, 1999); (2) guru BK/konselor sering merasa terancam oleh intrisi kelompok profesional di sekolah. Mereka menciptakan situasi terasing dari komunitas dan terisolasi dari para profesional sekolah dan siswa (Taylor dan Adelman, 1999); (3) para profesional sekolah dan pendidik tidak mempertimbangkan kebutuhan siswa yang luas dalam desain dan implementasi program dan pelayanan. Model kolaborasi ini melihat kolaborasi

sebagai multidisiplin, antardisiplin, dan lintasdisiplin. Model ini memerlukan kombinasi sumber-sumber, program, tenaga-tenaga professional, keluarga, voluntir, menjadi layanan yang integral dan program-program yang mengungkap kebutuhan semua peserta didik. Dengan demikian model kolaborasi ini membawa peran baru bagi guru BK/konselor dalam menata ulang proses kolaborasi dengan meningkatkan koordinasi program dan layanan antara sekolah dan masyarakat, fokus pada kegiatan dukungan yang lebih ramping terkait dengan kesadaran yang luas dari hambatan untuk belajar dan dengan asumsi kepemimpinan atas proses perubahan (Taylor dan Adelman, 2000)

*Kedua*, Model kolaborasi inklusi (*Collaborative Inclusion Model*). Model ini dipelopori oleh Clark dan Bremen (2009). Model ini adalah salah satu model kolaborasi antara guru BK/konselor dengan guru mata pelajaran yang menghadirkan variasi praktek konsultasi. Model ini merekomendasi 7 langkah implementasi, yaitu: (1) alih tangan siswa dari guru, orang tua, kesiswaan kepada guru BK; (2) identifikasi permasalahan; (3) observasi kelas; (4) pelaksanaan intervensi dalam kelas; (5) pelaksanaan intervensi; (6) pengembangan rencana; (7) evaluasi dan monitor intervensi.

### PEMBAHASAN

Dalam POP (2016) layanan konsultasi dan layanan kolaborasi dikelompokkan dalam komponen layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik/konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera (Kemendikbud RI, 2016). Layanan konsultasi dan layanan kolaborasi ditempatkan sebagai salah dua strategi layanan responsive. Selain dikelompokkan dalam komponen layanan responsive, layanan konsultasi dan layanan kolaborasi juga ditempatkan sebagai layanan langsung, seperti tampak pada gambar berikut ini.

Komponen	Cara Pemberian Layanan	Strategi/Kegiatan/ Kegiatan Layanan
Layanan Responsif	Langsung	Konseling individual
		Konseling kelompok
		Konsultasi
		Konferensi kasus
		Advokasi
		Kunjungan rumah
	Melalui media	Konseling melalui elektronik
		Kotak masalah (Kotak Kebutuhan Peserta Didik/konseli)

**Gambar 1. Pemetaan Komponen Layanan Responsif, Cara Pemberian Layanan, serta Strategi Kegiatan Layanan di Sekolah menurut Panduan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Kemendikbud RI, 2016)**

Dalam POP (2016) dijelaskan bahwa layanan konsultasi merupakan proses pemberian masukan kepada konsulti atau upaya memperoleh dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program layanan. Artinya, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat berperan baik sebagai konsultan maupun konsulti. Tujuan layanan konsultasi adalah (1) Sebagai konsultan, memberikan masukan kepada konsulti; (2) Sebagai konsulti, memperoleh dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program layanan bimbingan dan konseling.

Sedangkan layanan kolaborasi dalaman POP (Kemendikbud RI, 2016) didefinisikan sebagai suatu kegiatan kerjasama interaktif antara guru BK/konselor dengan pihak lain (guru mata pelajaran, orang tua, ahli lain dan lembaga), yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling. Tujuan layanan kolaborasi adalah (1) Menjalin hubungan baik dengan pihak lain yang dilibatkan dalam pelaksanaan

program bimbingan dan konseling; (2) Memperoleh sumbangan pemikiran, gagasan dan tenaga yang diperlukan dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling.

Sementara itu dalam dokumen ASCA National Model (2012) layanan konsultasi dan layanan kolaborasi juga masuk dalam komponen layanan responsif. Layanan responsif dipahami sebagai berikut:

*“Responsive services consist of activities designed to meet students’ immediate needs and concerns. This component is available to all students and may be initiated by students, teachers or parents or by school counselors after a review of data”.*

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa komponen layanan responsif merupakan komponen layanan bimbingan dan konseling yang didesain untuk fokus pada kebutuhan siswa yang segera harus dibantu. Komponen ini juga disediakan bagi semua siswa yang diinisiasi oleh siswa, guru, orang tua atau oleh guru BK/konselor. Layanan responsif dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karier (ASCA, 2012). Layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai salah dua strategi layanan responsif digambarkan sebagai berikut.

**Figure 4.1 Delivery Component**

Item	Elements and Strategies	Recipient	Method
<b>Direct Student Services</b>	School Counseling Core Curriculum ■ Instruction ■ Group Activities  Individual Student Planning ■ Appraisal ■ Advisement  Responsive Services ■ Counseling ■ Crisis Response	All Students	Interactions with Students in:  Large Group  Classroom  Small Group  Individual
		Identified Students	
<b>Indirect Student Services</b>	■ Referrals ■ Consultation ■ Collaboration	All Students	Interactions with Others
		Identified Students	

**Gambar 2. Pemetaan Komponen Layanan Responsif dan Strategi Layanan di Sekolah Menurut ASCA National Model (2012)**

Layanan tidak langsung kepada siswa di dalam *ASCA National Model* (2012) didefinisikan sebagai berikut:

*“Indirect student services are services provided on behalf of students as a result of the school counselor’s interactions with others. Through indirect services, school counselors provide leadership, advocacy and collaboration, which enhance student achievement and promote systemic change related to equity and access”*

Sementara itu, layanan konsultasi dipahami sebagai strategi yang digunakan guru BK/konselor untuk mendukung pencapaian siswa melalui interaksi dan kerjasama dengan orang tua, guru, pendidik lainnya dan organisasi masyarakat. Guru BK/konselor berfungsi sebagai pendukung siswa untuk memajukan bidang belajar, karir dan pribadi/sosial melalui strategi ini. Selain itu, layanan konsultasi juga digunakan guru BK menerima informasi tentang kebutuhan siswa dan untuk

mengidentifikasi strategi itu meningkatkan pencapaian siswa (ASCA, 2012). Layanan kolaborasi dipahami sebagai kerja sama guru BK/konselor dengan pendidik lain, orang tua dan komunitas untuk mendukung keberhasilan siswa dan mengadvokasi kesetaraan dan akses untuk semua siswa melalui kolaborasi. Konselor sekolah dapat berkolaborasi dalam berbagai cara (ASCA, 2012)

Untuk mempermudah dalam membedakan dan mencari persamaan layanan responsif, layanan tidak langsung, layanan konsultasi dan layanan kolaborasi dapat dilihat matriks berikut ini:

Komponen pembeding	Panduan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	ASCA National Model Tahun 2012	Persamaan dan Perbedaan
Pengertian layanan responsive	Pemberian bantuan terhadap peserta didik/konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera	Kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak siswa. Komponen ini tersedia untuk semua siswa dan dapat diprakarsai oleh siswa, guru atau orang tua atau oleh konselor sekolah setelah meninjau data	<p><b>Persamaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan untuk siswa yang membutuhkan segera</li> <li>2. Sifatnya mendesak atau segera</li> </ol> <p><b>Perbedaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada <i>ASCA National Model</i> ada penjelasan pihak yang menginisiasi sedangkan pada POP tidak ada</li> </ol>
Pengertian layanan tidak langsung	Tidak ada	Layanan yang disediakan atas nama siswa sebagai hasil dari interaksi guru BK dengan orang lain. Melalui layanan tidak langsung, guru BK menyediakan kepemimpinan, advokasi dan kolaborasi, untuk meningkatkan prestasi siswa dan mempromosikan perubahan sistemik terkait dengan kesetaraan dan akses	<p><b>Perbedaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada <i>ASCA National Model</i> ada istilah layanan tidak langsung, sedangkan pada POP tidak ada.</li> </ol>
Pengertian layanan konsultasi	Proses pemberian masukan kepada konsulti atau upaya memperoleh dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program layanan. Artinya, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat berperan baik sebagai konsultan maupun konsulti	Strategi yang digunakan guru BK untuk mendukung pencapaian siswa dalam bidang belajar, karier dan pribadi/sosial interaksi dan kerjasama dengan orang tua, guru, pendidik lainnya dan organisasi masyarakat. Layanan konsultasi juga digunakan guru BK menerima informasi tentang kebutuhan siswa dan untuk mengidentifikasi strategi meningkatkan pencapaian siswa	<p><b>Persamaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru BK memerankan konsultan</li> <li>2. Konsultasi sebagai bantuan kepada konsulti</li> </ol> <p><b>Perbedaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam <i>ASCA National Model</i> guru BK/konselor hanya berperan sebagai konsultan sedangkan dalam POP selain konsultan guru BK juga bisa menjadi pihak konsulti</li> <li>2. Tujuan konsultasi dalam <i>ASCA National Model</i> fokus pada siswa sebagai perhatian BK sedangkan dalam POP juga kepada guru BK sebagai konsulti.</li> <li>3. Dalam <i>ASCA National Model</i> layanan konsultasi sebagai layanan tidak</li> </ol>

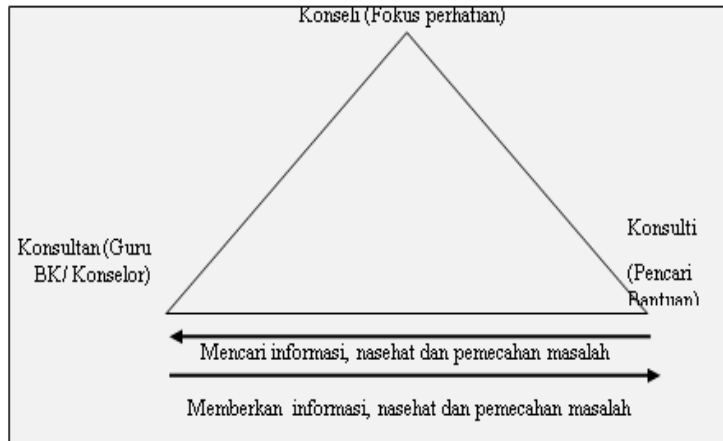


Komponen pembeding	Panduan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling	ASCA National Model Tahun 2012	Persamaan dan Perbedaan
Pengertian layanan kolaborasi	Suatu kegiatan kerjasama interaktif antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan pihak lain (guru mata pelajaran, orang tua, ahli lain dan lembaga), yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling	Kerja sama guru BK dengan pendidik lain, orang tua dan komunitas untuk mendukung keberhasilan siswa dan mengadvokasi kesetaraan dan akses untuk semua siswa melalui kolaborasi.	<p>langsung sedangkan dalam POP sebagai layanan langsung</p> <p><b>Persamaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama guru BK dengan pihak lain (rang tua, guru, masyarakat, ahli, dll).</li> <li>2. Guru BK memerankan peran mitra kerja sama</li> </ol> <p><b>Perbedaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam <i>ASCA National Model</i> layanan kolaborasi untuk mendukung keberhasilan siswa sedangkan dalam POP untuk pengembangan dan pelaksanaan program BK</li> <li>2. Dalam <i>ASCA National Model</i> layanan kolaborasi sebagai layanan tidak langsung sedangkan dalam POP sebagai layanan langsung</li> </ol>

Berdasarkan tabel di atas tampak ada persamaan konsep layanan konsultasi dan layanan kolaborasi yang terdapat dalam POP dan *ASCA National Model*, yaitu: (1) sama-sama sebagai salah dua strategi layanan komponen layanan responsif, yaitu layanan yang sifatnya segera dan peruntukkannya untuk siswa yang bermasalah; (2) guru BK/konselor memerankan peran konsultan dalam layanan konsultasi dan mitra dalam layanan kolaborasi. Sedangkan perbedaan-perbedaan konsep yang ditemukan ada dua, yaitu: (1) layanan konsultasi dan layanan kolaborasi ditempatkan sebagai layanan tidak langsung dalam *ASCA National Model* sedangkan dalam POP sebagai layanan langsung; (2) dalam *ASCA National Model* secara eksplisit dijelaskan tujuan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi yaitu keberhasilan siswa, sedangkan dalam POP tujuan layanan konsultasi dan kolaborasi untuk pengembangan dan implementasi program BK.

Adanya perbedaan konsep layanan konsultasi dan kolaborasi yang terdapat dalam *ASCA National Model* dan dalam POP berdampak pada implementasi layanan konsultasi dan layanan kolaborasi di lapangan. Penempatan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai layanan langsung barangkali menjadi penyebab guru BK/konselor mengalami kesulitan membedakan antara layanan konseling dengan layanan konsultasi (Maryati, 2010). Layanan konsultasi dan layanan kolaborasi dalam POP kurang mendapat penekanan sebagai salah satu layanan utama yang mendukung layanan utama bimbingan dan konseling di sekolah untuk keberhasilan peserta didik. Pemahaman seperti ini juga diduga membuat para praktisi kurang memberikan ruang kepada layanan konsultasi dan layanan kolaborasi dalam program bimbingan dan konseling baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Layanan Konsultasi misalnya belum lazim dicantumkan secara eksplisit sebagai salah satu komponen program bimbingan yang penting untuk diimplementasikan (Widodo, 2009). Perlakuan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi yang kurang tersebut juga diduga sebagai salah satu penyebab keterampilan memberikan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi tidak masuk dalam kurikulum pendidikan sarjana bimbingan dan konseling, yang mengakibatkan keterampilan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi guru BK/konselor rendah (Maryati, 2010, Widodo, 2009).

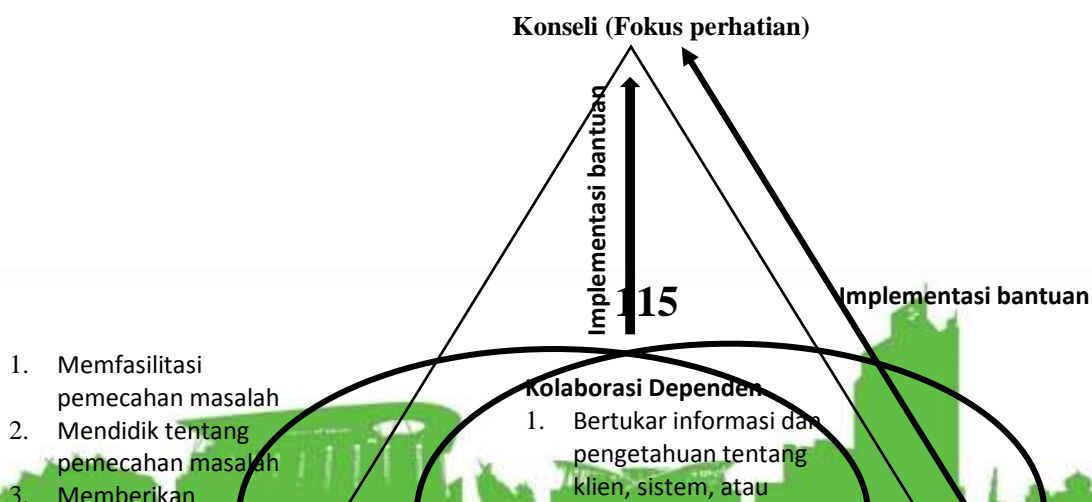
Berdasarkan analisis kedudukan layanan konsultasi dan layanan kolaborasi serta membaca sistem pendidikan Indonesia serta budaya kerja guru BK di sekolah maka perlu direkomendasi satu model layanan konsultasi dan layanan kolaborasi untuk membantu siswa pertama-tama dan membantu terlaksananya layanan utama bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan berjalannya layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai salah dua strategi layanan tidak langsung maka berbagai persoalan yang menyebabkan kurang berjalan dan efektifnya implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah dapat diatasi. Berikut ini diusulkan model hipotetik layanan konsultasi yang kemudian bergerak menjadi layanan kolaborasi.



Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa proses konsultasi adalah inisiatif konsulti atau pencari bantuan yang mungkin dilakukan oleh orang tua, guru, atau masyarakat. Kemudian guru

**Gambar 3. Layanan Konsultasi Model Triadik (Erford, 2011)**

BK/konselor yang berperan sebagai konsultan dengan keahlian yang dimiliki memberikan informasi dan rekomendasi pemecahan masalah. Sebelum memberikan informasi dan rekomendasi pemecahan masalah, identifikasi masalah dan diagnose masalah dilakukan sendiri oleh konsultan. Pada tahap ini pengumpulan data dimungkinkan dilakukan bersama antara konsultan dan konsulti. Setelah informasi lengkap dan rekomendasi intervensi disusun, konsultan menyampaikan ke konsulti. Konsulti kemudian memiliki kebebasan mahu menggunakan dan mengimplementasikan informasi dan rekomendasi pemecahan masalah tersebut ke pada konseli (siswa) atau tidak. Agar model konsultasi ini menjadi lebih kuat, berdampak, efektif dan ramah digunakan oleh guru BK/konselor dan para guru serta orang tua maka model tersebut didesain dan dimodifikasi seperti Gambar 4 berikut ini.



#### **Gambar 4. Model Hipotetik Layanan Konsultasi-Kolaborasi**

Model hipotetik layanan konsultasi-kolaborasi pada Gambar 4 di atas diadopsi dari Model Kolaborasi Independen dalam layanan konsultasi yang ditawarkan oleh Erford (2011). Berdasarkan gambar di atas terdapat lima langkah layanan konsultasi-kolaboratif. *Pertama*, Tahap Pembukaan. Aktivitas pada tahap ini meliputi (a) membangun hubungan kerja profesional antara konsultan dengan konsulti; (b) mengeksplorasi kebutuhan konsulti; (c) menetapkan tujuan sementara bersama konsulti.

*Kedua*, Tahap Diagnosa. Pada tahap ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu: (a) mengumpulkan informasi tentang situasi, konsulti, dan sistem yang menjadi fokus perhatian konsulti; (c) mendefinisikan permasalahan bersama konsulti; (d) bersama konsulti mengkonfirmasi tujuan; (e) menetapkan intervensi yang mungkin dilakukan untuk membantu konseli.

*Ketiga*, Tahap Transfer. Pada tahap ini konsultan mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan konsulti untuk mengimplementasikan intervensi yang telah dirancang. Pada tahap ini konsultan mengedukasi konsulti tentang permasalahan dan pemecahan masalah. Konsultan juga memberikan keahlian tentang bagaimana memecahkan masalah. Bentuk-bentuk aktivitas transfer pengetahuan dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok dalam bentuk pelatihan.

*Keempat*, Tahap Implementasi. Pada tahap ini dilakukan berbagai aktivitas, yaitu: (a) memfasilitasi konsulti memilih intervensi; (b) memfasilitasi konsulti mengembangkan rencana aksi; (c) konsulti secara mandiri atau bersama-sama dengan konsultan mengimplementasikan program; (d) bersama-sama mengevaluasi program layanan.

*Kelima*, Tahap Pelepasan (disengagement). Pada tahap ini dilakukan berbagai aktivitas, yaitu: (a) menformula rencana-rencana lanjutan bersama konsulti; (b) konsultan mengurangi keterlibatan; (c) mengundang konsulti kembali untuk melihat perkembangan konseli.

#### **PENUTUP**

Menyadari adanya perbedaan konsep layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai layanan tidak langsung kepada siswa yang terdapat dalam POP (2016) dan ASCA National Model (2012) maka dipandang perlu diadakannya peninjauan ulang naskah Panduan Operasional Penyelenggaraan (POP) Bimbingan dan Konseling di sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2016 agar layanan konsultasi dan layanan kolaborasi dapat dilabuhkan di lapangan sesuai dengan konsepnya dan

memperlancar layanan langsung bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan demikian antara layanan langsung dan layanan tidak langsung akan saling melengkapi demi kesuksesan akademik, pribadi, sosial dan karier siswa.

Selain itu, model hipotetik layanan konsultasi dan kolaborasi yang ditawarkan dalam makalah ini diharapkan cukup mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan di Indonesia dan regulasi mengajar di sekolah-sekolah. Dengan demikian, kendala-kendala terlaksananya layanan langsung seperti rendahnya kompetensi guru BK/konselor mengembangkan dan mengimplementasikan program BK, ratio guru BK/konselor dengan siswa yang tinggi, guru BK/konselor yang tidak memiliki jam masuk kelas, akan dapat diatasi dengan optimalisasi layanan konsultasi dan layanan kolaborasi sebagai strategi layanan tidak langsung.

Layanan konsultasi dan layanan kolaborasi dapat menjadi media layanan dalam membangun hubungan sinergis antara konselor dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan implementasi program BK di sekolah. Menyadari terbatasnya pemahaman konselor tentang teori konsultasi dan kolaborasi, maka dipandang perlu diadakan aktivitas yang bersifat pengembangan profesionalitas konselor, lebih-lebih dalam rangka mengkaji secara teori dan latihan-latihan yang representatif berkaitan dengan pelaksanaan layanan konsultasi. Aktivitas ini dapat ditempuh antara lain melalui *in-service training*, dan kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar dan *workshop* (lokakarya). Adapun materi yang dapat dijadikan bahan diskusi adalah menyangkut: (1) pengertian konsultasi dan kolaborasi; (2) tujuan konsultasi dan kolaborasi; (3) model layanan konsultasi dan layanan kolaborasi; (4) pengembangan program layanan konsultasi dan layanan kolaborasi; (5) proses layanan konsultasi dan layanan kolaborasi; dan (5) simulasi layanan konsultasi dan layanan kolaborasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- American School Counselor Association (2012). *The ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs, Third Edition*. Alexandria, VA: Author.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bemak, F. (2000). Transforming the role of the counsellor to provide leadership in educational reform through collaboration. *Professional School Counseling*, 3 Hal. 323-331.
- Clark, M., & Bremen, J. (2009). School Counselor inclusion: A collaborative model to provide academic and social emotional support in the classroom setting. *Journal of counselling & development* 87 (1), hal 6-11
- Dahir, Carol. Stone Carolyn. (2009). School Counselor Accountability: The Path to Social Justice and Systemic Change. *Journal of Counseling and Development* : JCD. Alexandria: Winter 2009. Vol. 87, Iss. 1; pg. 12, 9 pgs
- Dollarhide. Colette. T & Saginak, Kelli A. (2012). *Comprehensive School Counseling Programs, K-12 Delivery Systems in Action*. New Jersey: Pearson
- Dougherty, A.M. (1999). *Psychological Consultation and Collaboration in School and Community Setting* (3<sup>rd</sup> ed). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Erford, Bradley T. (2011). *Transforming The School Counseling Profession*. Upper Saddle River: Pearson
- Falah, Nailul. (2016). Peningkatan Layanan Bimbingan Dan Konseling Melalui Pelatihan Pembuatan Media Bimbingan Pada Konselor Sekolah di Man Lab. UIN Yogyakarta. *Jurnal Hisbah*, Vol. 13, No. 1 Juni 2016, hal.59-85
- Jumail. (2013). *Kompetensi Profesional dalam Perspektif Konselor Sekolah dan Peranannya terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri Padang*. Tesis. Padang: Program Pasca Sarjana UNP

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2016). Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Maryati, Reni (2010). Pelaksanaan Layanan Konsultasi Oleh Guru Pembimbing di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar. *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2010. Tidak Diterbitkan
- Nurrahmi, Hesty. (2015). Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Dakwah Alhikmah, Vol. 9, No.1*. Hal.45-55.
- Permendikna RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Permendikbud Nomor 27 tahun 2008 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*
- Tulus, Minto. (2012). Guru BK / Konselor Sekolah Perlukah Ada Jam Masuk Kelas ?. Tersedia di : <https://mintotulus.wordpress.com/2012/09/25/pelayanan-dasar-bimbingan-dan-konseling-kurikulum-bimbingan/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan
- Taylor, L., & Adelman, H. (2000). Connecting School, Families, and Communities. *Professional School Counseling*, 3, hal. 298-307
- Widodo, Bernardus. (2009). Layanan Konsultasi Orang Tua Salah Satu Bidang Layanan Bimbingan Konseling Untuk Membantu Mengatasi Masalah Anak (Sebuah Refleksi Analitis). *Jurnal Widya Warta* Vol 33, No 1 (2009), hal.1-20
- W.S. Winkel & S. Hastuti. (2013). *Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.